

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.

Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumi.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Arie S. Hutagalung, 2002. *Condominium dan Permasalahannya*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Chidir Ali, 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: Refika Aditama.

Diana Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Erly Suandy, 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2008. *Perencanaan Pajak (Edisi Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2011. *Hukum Pajak Edisi ke-5*. Jakarta: Salemba Empat.

Herlien Budiono, 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.

Hilman Hadikusuma, 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumi.

_____. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

J. Satrio, 1999. *Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumi.

K. Wantijk Saleh, 1997. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia.

Kelsen, Hans, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.

Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Mariam Darus Badruzaman, 2005. *Aneka Hukum Bisnis (Cetakan ke-2)*. Bandung: Alumni.
- Maria Farida Indarti Soeprapto, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Munir Fuady, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oyok Abunyamin, 2014. *Pilar-pilar Perpajakan*. Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
- R.M. Suryodiningrat, 1996. *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito.
- R. Santoso Brotodihardjo, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim. H.S, 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samuel Hutabarat, 2010. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Gramedia.
- Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Siti Resmi, 2014. *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Subekti, 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung; Alumni.
- _____. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa.
- _____. 2001. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermasa.
- _____. 2001. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sumyar, 2004. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal / Makalah / Artikel

Herlien Budiono, 2004. *artikel “Pengikat Jual Beli dan Kuasa Mutlak” Majalah Renvoi, Edisi Tahun 1, Nomor 10.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, dan Pajak Perseroan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Surat Keputusan Nomor 09/KTSP/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli.

Staatsblad No.27 Tahun 1834 Tentang Ordonansi Balik Nama.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2014 Tentang Pengawasan Atas Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Melalui Jual Beli.

D. Rujukan Internet

<http://pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak> diakses pada tanggal 30-07-2017 pukul 21.30 WIB

<http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> diakses pada tanggal 18-07-2017 pukul 20.30 WIB

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/> diakses pada tanggal 26-07-2017 pukul 20.30 WIB

www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf

www.ejournal.undip.ac.id, berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Dewi Himijati Tandika di Jakarta.